



EDISI KAMIS 15 OKTOBER 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02
05
10GOVERNMENTTODAY
Dirut PLN Darmawan Dicopot, Danantara
Ambil AlihNUSANTARA
Ledakan Pasar Cimanggis Hancurkan 5 Bangunan:
Satu Jenazah Ditemukan dan 8 LukaLISTSTYLE
Tren Kecantikan Spring 2027
Riasan Mata Berani, Poni Ekstrem dan Lipstik Merah

ANTREAN BBM MENGULAR, MENGAPA DIKLAIM AMAN?

Ombudsman RI Temukan di 11 Provinsi, Butuh 4 Jam di Bali

Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) memunculkan pertanyaan tentang jaminan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional. Pemerintah menyatakan stok masih mencukupi untuk kebutuhan 18-20 hari. Namun, laporan gangguan pasokan di sejumlah daerah memperlihatkan bahwa kecukupan persediaan nasional tidak selalu menjamin BBM tersedia tepat waktu di tingkat konsumen. Pada Rabu, 14 Oktober 2026, Ombudsman RI mencatat antrean dan gangguan pelayanan BBM di 11 provinsi. Wilayah tersebut meliputi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Gangguan yang ditemukan beragam, mulai dari antrean panjang, kekosongan jenis BBM tertentu, hingga kendaraan yang mengular sampai ke badan jalan. Di sejumlah lokasi, antrean dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer. Di Sumatera Barat, waktu tunggu berkisar dua hingga tiga jam. Bahkan di Bali mencapai 4 jam. Sedangkan antrean Pertalite di beberapa lokasi di Sulawesi Utara mencapai 300-500 meter. Aman dari sudut mana? Bersambung Hal. 11.

KUOTA VS REALISASI

PENYALURAN BBM (2022-2025)

2022:

- 18,32 juta KL
- 18,10 juta KL
- 29,91 juta KL
- 29,49 juta KL

2023:

- 17,50 juta KL
- 18,06 juta KL
- 32,56 juta KL
- 30,03 juta KL

2024:

- 19,58 juta KL
- 18,10 juta KL
- 31,70 juta KL
- 15,00 juta KL

2025:

- 19,41 juta KL
- 18,92 juta KL
- 31,23 juta KL
- 28,06 juta KL

Catatan Sumber: Kementerian ESDM dan BPH Migas.

- Kuota Solar + minyak tanah
- Kuota Pertalite
- Realisasi Solar + minyak tanah
- Realisasi Pertalite



Solar Subsidi:

Kuota 2026: 18,64 juta KL
Rencana awal 2027: 18,80 - 19,00 juta KL
APBN 2027: 19,00 juta KL

Minyak Tanah

Kuota 2026: —
Rencana awal 2027: 0,543 - 0,561 juta KL
APBN 2027: 0,561 juta KL

Total BBM Subsidi:

Kuota 2026: 19,14 juta KL
Rencana awal 2027: 19,343 - 19,561 juta KL
APBN 2027: 19,561 juta KL

Pertalite (Kompensasi/Penugasan):

Kuota 2026: 29,27 juta KL
Rencana awal 2027: Perlu konfirmasi
APBN 2027: Perlu konfirmasi

Antrean motor di SPBU Badung, Bali terjadi sudah hampir sepekan.
(@infoabiansemail)

KUOTA BBM SUBSIDI 2026-2027

DIRUT PLN DARMAWAN DICOPOT, DANANTARA AMBIL ALIH

Pemadaman listrik belasan jam di Batam berujung pada penyegaran manajemen PLN. Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo resmi dicopot dari jabatannya pada Rabu (14/10/2026). Danantara meminta maaf dan menjanjikan pembenahan, sementara penyebab gangguan masih berupa dugaan teknis.

Pergantian pimpinan perusahaan pelat merah itu berlangsung bersamaan dengan rencana pembenahan manajemen PLN dan pengalihan pengelolaan PLN Batam langsung di bawah Danantara Indonesia.

Komisaris Independen PLN Andi Arief membenarkan pergantian tersebut. Ia mengatakan posisi Darmawan untuk sementara digantikan Suroso Isnandar, yang sebelumnya menjabat Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN. "Iya, ada pergantian. Pak Darmawan digantikan Pak Suroso," kata Andi, Rabu (14/10).

Pergantian itu, menurut Andi, diputuskan dalam rapat melalui Zoom yang dihadiri jajaran direksi dan komisaris PLN serta Badan Pengaturan (BP) BUMN. Pergantian pimpinan tersebut terjadi setelah gangguan pasokan listrik di Batam pada Senin (12/10).

Pada hari yang sama, Suroso menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Presiden bersama CEO Danantara Rosan Roeslani untuk membahas gangguan kelistrikan di Batam. Dalam pertemuan itu, Prabowo menginginkan pembenahan di tubuh PLN. Suroso mengakui masih terdapat pekerjaan rumah dalam meningkatkan keandalan pasokan listrik, terutama di tengah pertumbuhan permintaan energi.

"Kita menyadari banyak yang harus di-improve, termasuk yang ada di Batam ini, sehingga kemarin ada gangguan di salah satu transformator menyebabkan padam yang mengurangi pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Keterangan Suroso mengarah pada gangguan transformator sebagai salah satu persoalan, sedangkan Bahlil menyebut beberapa gangguan jaringan yang masih perlu diperjelas secara teknis.



Mantan Direktur Utama
PT PLN (Persero)
Darmawan Prasodjo

Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria juga menyampaikan permohonan maaf kepada pelanggan PLN Batam. Dalam keterangan resmi pada Rabu (14/10), ia menyatakan Danantara akan mendukung penguatan keandalan pasokan listrik, peningkatan mutu pelayanan, dan perbaikan respons terhadap kebutuhan pelanggan. "Atas nama Danantara Indonesia, kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan PLN Batam atas ketidaknyamanan akibat gangguan pasokan listrik pada 12 Oktober 2026," kata Dony.

Ia menambahkan, "Kebutuhan pelanggan menjadi perhatian utama kami, dan kami berkomitmen untuk mendukung PLN Batam dalam memberikan pelayanan yang semakin baik."

Danantara juga menyatakan akan melakukan penyegaran manajemen PLN sebagai bagian dari upaya memperbaiki pelayanan publik dan memperkuat kinerja perusahaan. "Melalui penyegaran manajemen ini, kami ingin memastikan masyarakat dapat merasakan peningkatan kualitas layanan, mulai dari keandalan pasokan hingga respons terhadap kebutuhan pelanggan. Kami juga ingin PLN semakin siap mendukung kegiatan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia," ujar Dony.

Selain perubahan manajemen di tingkat pusat, Danantara mengumumkan PLN Batam selanjutnya akan berada langsung di bawah pengelolaannya. "Sebagai bagian dari arah transformasi dan pengembangan usaha tersebut, PLN Batam selanjutnya akan berada langsung di bawah Danantara Indonesia," katanya.

Pengalihan pengelolaan itu disebut sebagai bagian dari strategi pengembangan usaha, peningkatan kualitas layanan, dan penguatan daya tarik investasi di Batam.

Danantara menilai PLN Batam

memiliki peluang berkembang seiring posisi Batam sebagai salah satu penggerak ekonomi dan tujuan investasi.

PLN Batam merupakan anak usaha PLN yang mengelola penyediaan listrik di wilayah tersebut. Dalam keterangan yang dikutip kumparan, perusahaan itu disebut beroperasi secara mandiri dari hulu hingga hilir tanpa subsidi APBN dari pemerintah pusat, sejalan dengan karakter Batam sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas (Free Trade Zone/FTZ).

Sebelumnya, PLN Batam menyatakan proses pemulihan pasokan listrik telah mencapai kemajuan signifikan sejak Senin malam. Perusahaan mengklaim seluruh gardu induk, jaringan transmisi, dan jaringan distribusi yang terdampak telah dinormalkan sehingga pasokan listrik ke rumah warga kembali menyala.

Pemulihan dilakukan melalui pemeriksaan pembangkit, sinkronisasi unit, serta penyesuaian beban jaringan transmisi dan distribusi. Meski pasokan telah dipulihkan, gangguan selama belasan jam menyisakan persoalan mengenai keandalan infrastruktur dan mutu pelayanan kelistrikan bagi masyarakat maupun dunia usaha.

Persoalan berikutnya adalah pemenuhan hak pelanggan atas kompensasi. Bahlil mengatakan akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan PLN karena perusahaan tersebut lebih memahami kondisi teknis dan pelaksanaan penanganan gangguan di lapangan. "Saya nanti akan bicarakan terlebih dahulu dengan teman-teman dari PLN. Karena PLN yang paling tahu secara teknis implementasi di lapangan ya," ujarnya.

Sekretaris Perusahaan PLN Batam Rudi Antono menyatakan kompensasi akan diberikan jika durasi gangguan terbukti melampaui standar Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Untuk pelanggan reguler, kompensasi disebut sebesar 10 persen dari biaya beban bulanan, mengacu pada Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 22 Tahun 2017.

Sementara pelanggan dengan layanan keandalan khusus berhak atas kompensasi 15-25 persen dari Rupiah Pemakaian Tenaga Listrik (RPTL). Pemotongan kompensasi, menurut Rudi, akan diperhitungkan secara otomatis pada tagihan bulan berikutnya tanpa pengajuan klaim.

Petir dan Hewan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan gangguan mulai terjadi sekitar pukul 06.37 WIB. Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat tiga persoalan teknis pada jaringan listrik, termasuk dugaan gangguan akibat sambaran petir dan hewan.

"Batam ada beberapa jaringan yang kena trouble karena ada petir. Menurut mereka ada kesalahan teknis lah, kira-kira begitu. Teknisnya itu ada tiga, salah satu di antaranya adalah katanya ada hewan atau apa yang kena kelelawar atau apa, kira-kira begitu ya," kata Bahlil di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (14/10).

Penjelasan tersebut masih berupa dugaan berdasarkan informasi yang diterima Bahlil, bukan kesimpulan investigasi teknis yang telah dipastikan.

Rabu malam, PT PLN (Persero) mengklaim pemulihan pasokan listrik di Batam, Kepulauan Riau, telah mencapai 100 persen. Namun, pemulihan di wilayah Bintan masih berlangsung. Di tengah normalisasi layanan, PLN belum memastikan penyebab pemadaman massal yang mengganggu aktivitas masyarakat sejak Senin (12/10).

Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menyampaikan perkembangan tersebut se usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. "Sudah pulih per hari ini hampir semuanya sudah pulih, Batam sudah pulih 100% dan Bintan sebagian menyusul," ujar Suroso, dikutip Berita Satu. Ia mengatakan PLN masih menelusuri secara saksama penyebab gangguan untuk mengidentifikasi persoalan yang perlu diperbaiki.

Menurut Suroso, pemadaman berkaitan dengan gangguan pada salah satu transformator yang berdampak terhadap pelayanan kelistrikan. Meski demikian, ia belum menyimpulkan penyebab pasti insiden tersebut. "Sedang kami telusuri secara saksama dan kita tidak menutup kemungkinan berbagai alasan, mana yang harus kita improve," katanya. Evaluasi juga akan mencakup pemeliharaan infrastruktur kelistrikan, terutama untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik di Batam. (tin,ktn,kcm,ist/dya)



Suroso Isnandar

Direktur Utama PT PLN (Persero) yang baru

DELAPAN PARTAI 'GUREM' USULKAN AMBANG BATAS PARLEMEN 1%

Delapan partai politik 'gurem' alias nonparlemen yang tergabung dalam Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) mengusulkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 1 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Usulan ini ditujukan untuk mengurangi jumlah suara sah yang tidak terkonversi menjadi kursi DPR RI. Sekaligus mendorong sistem pemilu yang lebih proporsional menjelang Pemilu 2029.

Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, mengatakan penentuan ambang batas parlemen harus memiliki dasar hukum, rasionalitas, dan metode penghitungan yang jelas. Usulan tersebut disusun berdasarkan evaluasi hasil pemilu sebelumnya serta Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023.

"Partai Perindo dan GKSR konsisten bahwa 'parliamentary threshold' harus jelas rasionya, harus jelas kenapa muncul angka," kata Ferry di Mataram, Rabu (14/10/2026).

Ferry menyebut, berdasarkan perhitungan yang disampaikan kelompoknya, sekitar 13 juta suara tidak terkonversi menjadi kursi DPR pada Pemilu 2019. Jumlah itu meningkat menjadi sekitar 17,3 juta suara pada Pemilu 2024. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan GKSR mendorong penurunan ambang batas parlemen menjadi 1 persen agar lebih banyak suara pemilih berpeluang memperoleh representasi di DPR.

"Dalam hitungan-hitungan yang ada dari mulai 2009, 2014, 2019, 2024, kita menghitung dengan mekanisme hukum pemilu yang memang ada di sana, maka harusnya PT itu adalah satu persen. Jadi kami dari Partai Perindo mengusulkan PT itu," ujarnya.

GKSR terdiri dari delapan partai, yakni Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, Partai Buruh, Partai Ummat, Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Berkarya.

Langkah politik GKSR didasari atas besarnya jumlah suara sah pemilih yang dinilai "terbuang" sia-sia pada Pemilu 2024. Berdasarkan data resmi rekapitulasi nasional Komisi Pemilihan Umum (KPU), akumulasi perolehan suara dari kedelapan partai yang tergabung dalam koalisi ini mencapai 11.355.230 suara, atau setara dengan 7,48 persen dari total suara sah nasional. Namun, akibat aturan ambang batas 4 persen yang berlaku saat itu, tidak ada satu pun dari partai ini yang berhasil menempatkan wakilnya di Senayan.

Mereka turut menyoroti pentingnya pelibatan partai nonparlemen dalam pembahasan revisi UU Pemilu, terutama ketika keputusan mengenai ambang batas



akan menentukan apakah suara pemilih dapat dikonversi menjadi kursi legislatif.

Usulan GKSR muncul ketika pembahasan revisi UU Pemilu mulai bergulir di DPR. Besaran parliamentary

threshold menjadi salah satu isu yang diperdebatkan karena berkaitan dengan keterwakilan politik, penyederhanaan jumlah partai di parlemen, dan efektivitas pemerintahan.

Buka Opsi 58 Kursi DPR dari Dapil Nasional

PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu membuka peluang perubahan sistem pemilihan anggota DPR RI melalui pembentukan daerah pemilihan (dapil) nasional. Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengusulkan sistem pemilu campuran yang menggabungkan dapil konvensional dengan satu dapil berskala nasional. Skema ini memungkinkan partai politik menempatkan calon legislatif yang gagal memperoleh kursi melalui dapil konvensional untuk masuk parlemen melalui mekanisme tambahan.

Doli menyebut gagasan tersebut sebagai sistem campuran yang disesuaikan dengan karakteristik politik Indonesia. Menurut dia, dapil nasional dapat memberi ruang bagi partai untuk mengakomodasi kader yang selama ini berkontribusi dalam mengurus organisasi, tetapi tidak berhasil memenangkan persaingan di

daerah pemilihan. "Maka kemudian kita mengusulkan sistem baru, sistem campuran juga namanya, tapi sistem campuran ala Indonesia lah saya katakan, dengan adanya dapil nasional," kata Doli dalam keterangan tertulis, Rabu (14/10/2026).

Ia menjelaskan, dapil nasional akan melengkapi 84 dapil konvensional yang selama ini digunakan dalam pemilihan anggota DPR RI. Dengan penambahan satu dapil, jumlahnya menjadi 85. Doli menyebut mekanisme tersebut sebagai bentuk kombinasi antara pemilihan berdasarkan wilayah dan kebijakan internal partai dalam menentukan kader yang dianggap layak mewakili organisasi di parlemen.

"Dapil nasional ini adalah representasi dari kebijakan internal partai, ya, untuk menentukan siapa-siapa orang-orang yang memang selama ini dianggap bisa mewakili partai karena dia selama ini

Sejumlah partai justru mendorong ambang batas lebih tinggi. Partai NasDem mengusulkan angka 6-7 persen, sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengusulkan 6 persen. Partai Gerindra disebut mengusulkan 5 persen, sementara Partai Golkar mengajukan kisaran 4-6 persen dengan gagasan penerapan ambang batas secara bertingkat, dari tingkat pusat hingga DPRD kabupaten/kota. (tin,ist,kum,dtc/dya)

Perolehan Suara GKSR Pemilu 2024

	PPP 5.878.777 (3,87%)
	Perindo 1.955.154 (1,29%)
	Hanura 1.094.588 (0,72%)
	Partai Buruh 972.910 (0,64%)
	Partai Ummat 642.545 (0,42%)
	PBB 484.486 (0,32%)
	PKN 326.800 (0,21%)
	Partai Berkarya 0 (0,00%)

mengurus partainya. Gitu lho. Nah, ini kombinasi sebenarnya," ujar Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI tersebut.

Salah satu opsi yang dibicarakan adalah mengalokasikan 5-10 persen dari total 580 kursi DPR RI untuk dapil nasional. Jika menggunakan proporsi 10 persen, jumlah kursi yang dialokasikan mencapai 58. "Nah sekarang yang berkembang, antara 10 persen, 5 persen. Katakanlah 10 persen. 10 persen dari jumlah kursi konvensional. Jadi kalau sekarang 580, maka nanti jumlah kursi yang dari dapil nasional itu, 580 kali 10 persen, berarti 58," kata Doli. Namun, angka tersebut masih berupa simulasi usulan dan belum menjadi keputusan resmi DPR. (tin,ist,dtc/dya)

HP GRATIS UNTUK BANSOS BERPOTENSI TELAN RP 105 TRILIUN

Pemerintah belum merinci kriteria penerima ponsel gratis untuk digitalisasi bantuan sosial. Ekonom menilai pengadaan massal berisiko membebani APBN jika tidak diikuti perbaikan data dan pengukuran manfaat yang jelas.

Rencana pemerintah membagikan telepon seluler (HP) gratis untuk mendukung digitalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) berpotensi membutuhkan anggaran hingga Rp 75 triliun hanya untuk pengadaan perangkat. Jika ditambah subsidi internet, kebutuhan dana tahunannya dapat meningkat menjadi Rp 93 triliun hingga Rp 105 triliun, belum termasuk biaya operasional dan pemeliharaan sistem. Perhitungan tersebut disampaikan ekonom Yusuf kepada kumparan, Rabu (14/10/2026).

Dengan asumsi cakupan program mencapai 50 juta orang dan harga ponsel dasar berkisar Rp 1,2 juta hingga Rp 1,5 juta per unit, biaya pengadaan perangkat diperkirakan mencapai Rp 60 triliun hingga Rp 75 triliun.

"Angka sebesar itu harus dibandingkan secara serius dengan manfaat yang benar-benar dihasilkan," kata Yusuf.

Kebutuhan anggaran belum berhenti pada pembelian ponsel. Pemerintah juga perlu menanggung biaya edukasi masyarakat, pusat pengaduan, pemeliharaan sistem, saldo awal, serta penggantian perangkat setiap tiga atau empat tahun. Sementara itu, subsidi internet dengan asumsi Rp 30 ribu hingga Rp 50 ribu per penerima per bulan berpotensi menambah belanja Rp 18 triliun hingga Rp 30 triliun per tahun.

Belum Dirinci

Di tengah besarnya kebutuhan anggaran tersebut, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyatakan pemerintah belum merinci kriteria masyarakat yang berhak menerima ponsel gratis. Menurut dia, program itu dirancang untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan digital pemerintah.

"Secara spesifik kita belum (merinci), tetapi ini tujuannya dalam rangka untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan digital pemerintah," kata Gus Ipul saat ditemui di Jakarta Pusat, Kamis (14/10/2026).

Gus Ipul mengatakan pemerintah juga perlu membahas mekanisme pengawasan agar perangkat yang diberikan tidak dijual oleh penerima bantuan. Pengawasan dan evaluasi, menurut dia, akan disiapkan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

"Ya itulah (pencegahan) nanti akan



Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul

ada monitoring evaluasinya," ujarnya.

Ia berharap digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi pelayanan dan memperbaiki ketepatan penyaluran bansos. "Kalau nanti semua sudah bisa mengakses layanan digital, itu lebih efisien dan lebih tepat sasaran," kata Gus Ipul.

Kemensos menyatakan masih mengkaji usulan pembagian perangkat untuk membantu penerima manfaat yang belum memiliki sarana komunikasi. Pemerintah juga mengembangkan portal pelayanan Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk mempersempit kesalahan data dan membuka ruang bagi masyarakat mengajukan sanggahan.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan data penerima masih perlu diperbaiki. "Semua tentu memiliki kesempatan untuk melakukan sanggahan. Sudah kita siapkan jalurnya untuk sanggahan karena data kita memang belum semuanya sempurna," ujarnya.

Wacana pembagian ponsel gratis sebelumnya disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Policy Forum 2026 di Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Selasa (13/10/2026). Adik Presiden Prabowo Subianto itu menyebut pemerintah berencana menyediakan rekening bank bagi masyarakat yang belum memiliki akses perbankan.

Pemerintah juga menugaskan Bank Syariah Indonesia (BSI) dan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Rencana tersebut akan dilengkapi dengan penyediaan ponsel yang memiliki akun digital untuk mengakses layanan keuangan dan menerima bantuan.

"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam yang

dilengkapi akun digital. Seluruh dana akan tersedia di sana dan disalurkan ke rekening masing-masing," ujar Hashim.

Dengan mekanisme tersebut, penyaluran bansos diharapkan dapat dilakukan langsung ke rekening digital penerima, sehingga tidak lagi mengandalkan uang tunai. Namun, skema penerima, tata kelola perangkat, dan kebutuhan anggarannya masih perlu diperjelas sebelum program direalisasikan.

Ekonom Soroti APBN

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Rizal Taufikurrahman, juga mengingatkan besarnya biaya peluang fiskal dari program tersebut. Dengan asumsi harga ponsel Rp 1 juta hingga Rp 1,5 juta per unit, pengadaan untuk 10 juta penerima saja membutuhkan Rp 10 triliun hingga Rp 15 triliun, belum termasuk biaya operasional dan infrastruktur pendukung.

"Persoalannya bukan sekadar kemampuan APBN membiayai, tetapi besarnya biaya peluang fiskal ketika anggaran tersebut dapat digunakan untuk memperkuat bansos, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi," kata Rizal.

Menurut dia, pemberian ponsel tidak otomatis menyelesaikan persoalan inklusi keuangan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah masih perlu mengatasi ketimpangan akses digital, rendahnya literasi keuangan, dan lemahnya akurasi data penerima bansos.

Rizal juga mempertanyakan asumsi bahwa digitalisasi transaksi akan meningkatkan penerimaan pajak secara signifikan. Mayoritas penerima bansos merupakan kelompok berpendapatan rendah

SIMULASI PENGHEMATAN BANSOS

Asumsi anggaran perlindungan sosial Rp 500 triliun/tahun:

- Kebocoran turun 1% = hemat Rp 5 T
- Kebocoran turun 2% = hemat Rp 10 T
- Kebocoran turun 5% = hemat Rp 25 T
- Kebocoran turun 10% = hemat Rp 50 T
- Kebocoran turun 15% = hemat Rp 75 T
- Kebocoran turun 21% = hemat Rp 105 T

SIMULASI ANGGARAN HP GRATIS UNTUK BANSOS

- Target simulasi: 50 juta orang
- Harga HP: Rp 1,2 juta–Rp 1,5 juta/unit
- Biaya pengadaan HP: Rp 60–75 triliun
- Subsidi internet: Rp 30.000–Rp 50.000*
- Biaya internet setahun: Rp 18–30 triliun
- Total kebutuhan tahun pertama: Rp 78–105 triliun
- Biaya tambahan: Edukasi, pengaduan, pemeliharaan sistem, dan penggantian perangkat setiap 3–4 tahun.

*Orang/bulan

dengan kapasitas perpajakan terbatas.

"Peningkatan penerimaan negara membutuhkan perluasan aktivitas ekonomi formal, produktivitas, dan kepatuhan pajak, bukan sekadar penambahan rekening digital masyarakat miskin," ujarnya.

Karena itu, Rizal menyarankan pemerintah memprioritaskan integrasi data, interoperabilitas sistem, dan evaluasi efektivitas penyaluran bantuan sebelum melakukan pengadaan perangkat dalam skala besar.

"Ukuran keberhasilan kebijakan bukan jumlah HP yang dibagikan, melainkan seberapa jauh kebocoran anggaran berkurang, ketepatan sasaran meningkat, dan kesejahteraan masyarakat benar-benar membaik," tuturnya.

Dia juga mengingatkan bahwa digitalisasi tidak dengan sendirinya menghilangkan persoalan salah sasaran. Sebagian penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) telah menerima bantuan melalui rekening bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Kartu Keluarga Sejahtera. "Rekening hanya alat penyaluran. Sumber salah sasaran tetap berada pada kualitas data penerima. Jika datanya belum akurat, digitalisasi hanya akan mempercepat penyaluran yang keliru," jelasnya. (tin,ist,kum/dya)

LEDAKAN PASAR CIMANGGIS HANCURKAN 5 BANGUNAN: SATU JENAZAH DITEMUKAN DAN 8 LUKA

Ledakan di kompleks pertokoan Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, Rabu (14/10/2026) malam, menghancurkan lima bangunan, membalikkan sebuah mobil, dan menyebabkan satu orang meninggal dunia serta delapan lainnya terluka. Polisi menduga ledakan berkaitan dengan tabung gas elpiji (LPG), tetapi penyebab pastinya masih diselidiki.



Ledakan besar terjadi di kawasan Pasar Cimanggis, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Banten, Rabu (14/10/2026) Foto: Dok. Istimedia

Ledakan dilaporkan terjadi sekitar pukul 18.15–18.16 WIB, tidak lama setelah waktu Magrib. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Bambang Askar Sodik, membenarkan peristiwa tersebut. Ia mengatakan informasi awal mengenai kejadian itu diterima dari karyawan pasar: “Iya benar (ada ledakan sekitar pukul) 18.15–18.16 WIB tadi, saya dapat informasi dari karyawan pasar,” kata Bambang kepada wartawan, Rabu (14/10).

Suara ledakan terdengar hingga kawasan sekitar Pasar Cimanggis. Ade, warga sekaligus saksi mata yang diwawancarai Kumparan, mengatakan dentumannya cukup keras. “Iya, tadi habis Magrib terjadi ledakan besar. Suaranya terdengar jauh di Pasar Cimanggis, Ciputat,” ujarnya. Sejumlah warga kemudian berlarian menuju lokasi kejadian.

Rekaman video yang diterima memperlihatkan warga berusaha mendekati titik ledakan, sementara puing-puing bangunan berserakan dan seorang warga tergeletak dengan kondisi mengeluarkan darah.

Pantauan di lokasi menunjukkan lima bangunan mengalami kerusakan berat hingga runtuh. Besi dan material bangunan berserakan di sekitar titik ledakan. Sebuah mobil juga terlihat dalam kondisi terbalik, diduga akibat kuatnya ledakan. Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai tingkat kerusakan secara keseluruhan, jumlah bangunan lain yang mungkin terdampak, ataupun nilai kerugian material akibat

peristiwa tersebut.

Dampak ledakan juga terlihat dari banyaknya warga yang membutuhkan pertolongan. Kapolsek Ciputat Timur menyebut delapan korban luka telah dievakuasi ke dua rumah sakit. “8 orang dievakuasi ke rumah sakit, ke RS Fatmawati dan RS Sari Asih,” kata Bambang.

Para korban dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Informasi yang tersedia belum merinci identitas, jenis luka, maupun kondisi terkini masing-masing korban.

Sementara itu, relawan ambulans Tangerang Selatan, Tegar, mengatakan satu orang meninggal dunia dalam kejadian tersebut. Namun, penyebab kematian korban belum dapat dipastikan.

“Satu yang meninggal masih belum tahu (apakah karena ledakan atau tertimpa reruntuhan),” ujar Tegar kepada Kompas.com di lokasi. Dengan demikian, belum dapat dipastikan apakah korban meninggal akibat terkena dampak ledakan secara langsung atau tertimpa material bangunan yang runtuh.

Sejumlah polisi, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan relawan terlihat melakukan penanganan di lokasi. Mereka membongkar reruntuhan untuk mencari kemungkinan adanya korban yang masih tertimbun material bangunan. Ambulans juga berdatangan untuk membantu proses evakuasi. Petugas berupaya memastikan tidak ada korban lain yang terjebak di antara puing-puing bangunan.

Pengamanan di lokasi turut

melibatkan personel Brimob bersenjata dan kendaraan taktis Barracuda. Komandan Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Kombes Henik Maryanto, mengatakan sebanyak 50 personel Satbrimob telah diterjunkan untuk membantu penanganan. Personel tersebut bertugas memberikan pertolongan, membantu evakuasi, melakukan sterilisasi, mencari kemungkinan korban di area terdampak, serta mengamankan perimeter.

Henik mengatakan informasi awal mengarah pada dugaan keterkaitan ledakan dengan tabung gas LPG. Namun, ia menegaskan bahwa penyebab pasti kejadian masih didalami petugas. “Informasi awal menyebut ledakan diduga berkaitan dengan tabung gas elpiji, namun penyebab pasti masih didalami oleh petugas,” kata Henik dalam keterangannya, Rabu (14/10), sebagaimana dikutip CNN Indonesia.

Dugaan tersebut juga muncul dari

kesaksian Ade. Ia memperkirakan ledakan berasal dari gas di dapur yang berada di kawasan Pasar Cimanggis. Meski demikian, dugaan saksi tidak dapat dijadikan dasar untuk memastikan sumber ledakan. Hingga Rabu malam, belum ada hasil pemeriksaan resmi yang mengonfirmasi apakah ledakan benar-benar berasal dari tabung LPG, kebocoran gas, atau faktor lain.

Dalam penanganan di lapangan, personel Gegana melakukan sterilisasi area kejadian. Sementara itu, personel patroli Brimob menjaga perimeter agar petugas dapat bekerja dengan aman. Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan proses evakuasi dan pemeriksaan tempat kejadian perkara (TKP). Kehadiran personel Gegana menjadi bagian dari upaya memastikan keamanan area terdampak sebelum penanganan lebih lanjut dilakukan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, mengatakan polisi mengutamakan keselamatan masyarakat serta pemeriksaan berdasarkan fakta di lapangan. “Polisi hadir untuk memberikan pertolongan dan memastikan masyarakat terlindungi. Saat ini evakuasi, sterilisasi, dan olah TKP masih berlangsung,” ucap Budi.

Ia juga meminta masyarakat tidak berspekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum penyelidikan selesai. “Penyebab ledakan akan disampaikan berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga kami mengimbau masyarakat tidak berspekulasi dan memberikan ruang kepada petugas untuk bekerja,” sambungnya.

Polisi masih perlu memastikan rangkaian kejadian sebelum ledakan, sumber pemicu, serta bagaimana dampaknya dapat menyebabkan sejumlah bangunan runtuh dan sebuah mobil terbalik. Belum tersedia pula keterangan terverifikasi mengenai aktivitas di bangunan yang menjadi titik awal ledakan maupun kemungkinan faktor lain yang memperbesar dampaknya.

Hingga berita ini ditulis, petugas masih melakukan evakuasi, sterilisasi, dan olah TKP di kompleks pertokoan Pasar Cimanggis. Jumlah korban yang dilaporkan terdiri atas satu orang meninggal dunia dan delapan orang terluka, sedangkan dugaan keterkaitan dengan tabung LPG masih menunggu hasil pemeriksaan. (wid,ist,kum/dya)



Kekeringan di Kabupaten Malang: 13 Desa Bergantung Bantuan Air Bersih

MALANG - Sebanyak 13 desa di Kabupaten Malang masih bergantung pada bantuan distribusi air bersih di tengah penanganan kekeringan. Dari sebelumnya 14 desa terdampak yang tersebar di 6 kecamatan, baru Desa Tulungrejo, Kecamatan Donomulyo, dinyatakan aman setelah tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) melakukan asesmen pemberhentian air bersih sejak 5 Oktober 2026.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, mengatakan Desa Tulungrejo telah melakukan mitigasi mandiri dengan membuat saluran air dari sumber menuju wilayah yang terdampak kekeringan.

"Tulungrejo sudah melakukan mitigasi mandiri dengan membuat saluran dari sumber ke daerah yang kekeringan. Sementara ini sudah dinyatakan aman," ujar Sadono, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (14/10/2026).

Dengan perkembangan tersebut, ditegaskannya, jumlah desa yang masih menerima distribusi bantuan

air bersih berkurang dari sebelumnya 14 desa menjadi 13 desa yang tersebar di 6 kecamatan.

Sadono membenarkan, Tulungrejo saat ini menjadi satu-satunya desa yang dinyatakan aman dan tidak lagi menerima distribusi air bersih dari BPBD Kabupaten Malang.

Meski demikian, kondisi tersebut belum serta-merta menunjukkan seluruh wilayah terdampak kekeringan mulai pulih. BPBD masih menyalurkan bantuan air bersih ke desa-desa lain yang membutuhkan.

Berdasarkan laporan posko komando tanggap darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) BPBD Kabupaten Malang, dampak kekeringan sebelumnya tercatat meliputi 14 desa di enam kecamatan, dengan sekitar 5.799 kepala keluarga (KK) atau 18.414 jiwa terdampak.

Enam kecamatan tersebut meliputi Sumbermanjing Wetan, Gedangan, Sumberpucung, Donomulyo, Kalipare, dan Pagak.

Sadono menjelaskan, tidak setiap desa menerima distribusi air bersih

setiap hari. BPBD menerapkan pola pengiriman secara bergiliran, dengan interval dua hari sekali untuk setiap desa. "Memang ada beberapa desa yang kami mengirimkan di dua hari sekali per desanya," jelasnya.

"Sehingga desa yang tidak tercatat menerima pasokan pada hari ini misalnya, belum tentu sudah terbebas dari dampak kekeringan, melainkan dapat mengikuti jadwal pengiriman yang telah ditetapkan. Kecuali Tulungrejo," kata Sadono.

Dalam laporan distribusi air bersih per 13 Oktober 2026, Pusdalops PB BPBD Kabupaten Malang mencatat penyaluran sebanyak 112.300 liter menggunakan 7 armada dengan total 22 rit pengiriman.



Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan. (foto: ist)

Distribusi tersebut mencakup sejumlah desa di Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Kalipare, dan Pagak. Sementara itu, beberapa desa di Kecamatan Gedangan dan Donomulyo tidak tercatat menerima pengiriman pada hari tersebut. (Santi/Dya)

Dari Kebutuhan Cabai Rawit 220 Ton/Bulan, Produksi Lokal Kota Malang hanya 13 Ton

Arsip-Lahan pertanian cabai di wilayah Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. (Santi/Lentera)



MALANG- Kebutuhan konsumsi cabai rawit kecil (CRK) di Kota Malang mencapai 220 ton per bulan. Namun, produksi cabai rawit dari petani lokal masih minim, yakni hanya 13 ton sehingga belum mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan konsumsi masyarakat Kota Malang.

Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Elfiatur Roikhah, membenarkan

produksi lokal tersebut hanya mampu memenuhi sekitar 5,9 persen dari total kebutuhan cabai rawit kecil setiap bulannya.

"Sebagian besar kebutuhan cabai rawit kecil masyarakat Kota Malang masih harus dipenuhi melalui pasokan dari luar daerah," ujarnya, dikonfirmasi melalui pesan singkat, Rabu (14/10/2026).

Sementara itu, menurutnya, kebutuhan cabai merah besar (CMB) di Kota Malang tercatat mencapai 156 ton per bulan. Dari jumlah tersebut, produksi lokal mencapai 65 ton atau sekitar 41,7 persen dari total kebutuhan bulanan.

Elfi menjelaskan, ketersediaan cabai rawit kecil saat ini diperkirakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Malang selama 7 hari ke depan. Adapun ketersediaan cabai merah besar diperkirakan mampu mencukupi kebutuhan hingga 15

hari ke depan.

Diketahui, luasan lahan pertanian cabai di Kota Malang mencapai sekitar 70 hektare. Dengan rincian 30 hektare berada di kawasan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru. Sedangkan 40 hektare lainnya tersebar di kawasan Kecamatan Kedungkandang.

Terpisah, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menjelaskan belum terpenuhinya kebutuhan cabai masyarakat dari produksi lokal turut dipengaruhi oleh distribusi hasil panen.

Sebab, menurutnya, tidak seluruh hasil panen petani lokal dapat dipastikan masuk ke pasar/pasar di Kota Malang. Petani memiliki keleluasaan untuk menjual hasil produksinya ke daerah atau pasar yang menawarkan harga lebih menguntungkan.

Sebagian hasil panen cabai dari petani lokal, misalnya, dipasarkan ke Pasar Induk Gadam maupun Pasar Blimbing. Menurut Slamet, tujuan penjualan tersebut bergantung pada hasil negosiasi harga antara petani dan pembeli.

"Kami secara hukum pasar, petani menjual ke mana itu yang kami tidak bisa melarang. Biasanya tergantung nego harga yang paling mahal," jelasnya.

Di sisi lain, keterbatasan produksi cabai lokal terjadi ketika harga komoditas tersebut masih tinggi di pasaran. Sejak akhir September 2026, harga cabai di Kota Malang berada di kisaran Rp65 ribu hingga Rp68 ribu per kilogram.

Pedagang cabai rawit di Pasar Besar Malang, Harmeni, mengatakan kenaikan harga mulai terjadi sejak September 2026. Saat itu, harga cabai rawit masih berkisar Rp40 ribu hingga Rp45 ribu per kilogram. "Waktu itu sekilo masih Rp40-45 ribu. Sekarang Rp65 ribu. Naiknya merangkak," ujarnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Slamet menjelaskan tingginya harga cabai berkaitan dengan belum masuknya musim tanam. Pasalnya, hampir seluruh lahan pertanian cabai di Kota Malang merupakan lahan tadah hujan yang bergantung pada ketersediaan air saat musim hujan. (Santi/Dya)

2 WNI TERLUKA DALAM SERANGAN HOUTHI DI ARAB SAUDI

Telah dikonfirmasi ada dua warga negara Indonesia (WNI) terluka akibat serangan kelompok Houthi di Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, Minggu (11/10/2026). Keduanya mengalami luka ringan dan telah diperbolehkan pulang setelah mendapat perawatan medis. Pemerintah Indonesia menyiapkan rencana kontingensi untuk mengantisipasi eskalasi konflik yang mengancam keselamatan WNI di negara tersebut.



Kepulan asap membubung saat terjadi serangan udara, di Sana'a, ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi, pada 9 Oktober 2026. Diduga serangan dilakukan oleh koalisi pimpinan Arab Saudi. (AFP via Getty Images)

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI, Heni Hamidah, mengatakan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Riyadh menerima informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa (13/10/2026) mengenai dua WNI yang menjadi korban. Keduanya berinisial RM (45) dan ET (32), yang berstatus sebagai penduduk atau mukimin di Arab Saudi, bukan jemaah umrah.

"KBRI Riyadh telah menerima informasi resmi dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada hari Selasa (13/10/2026) yang menyampaikan bahwa terdapat dua WNI yang mengalami luka ringan," kata Heni melalui pesan singkat, Rabu (14/10/2026).

Kedua korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Sulaiman Habib di kawasan Al Shahafah dan Al-Takhasusi, Riyadh. Mereka diperbolehkan pulang pada hari yang sama setelah memperoleh penanganan medis. Berdasarkan informasi yang disampaikan KBRI, tidak ada WNI yang meninggal dunia akibat serangan tersebut.

KBRI Riyadh juga menelusuri kemungkinan adanya korban WNI di Rumah Sakit Mouwasat dan Rumah Sakit Riyadh setelah serangan susulan pada Senin (12/10/2026) dan Selasa (13/10/2026). Hasil penelusuran memastikan tidak ditemukan tambahan WNI yang terluka maupun meninggal dunia akibat insiden lanjutan tersebut.

Besarnya jumlah WNI yang berada di Arab Saudi membuat perkembangan konflik menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Heni menyebut terdapat sekitar 581.000 WNI di negara tersebut. Jumlah itu terdiri atas 351.070 WNI yang menetap atau berstatus residen dan 229.930 WNI pengunjung atau peziarah.

Pemerintah telah menyiapkan rencana kontingensi untuk menghadapi kemungkinan memburuknya situasi keamanan. Langkah tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.

"Rencana Kontingensi sudah disiapkan dan akan selalu disesuaikan dengan perkembangan di lapangan," kata Heni.

Kemlu RI juga mengimbau masyarakat Indonesia menunda perjalanan ke Arab Saudi yang tidak mendesak serta memeriksa kembali status penerbangan melalui maskapai masing-masing. Imbauan ini disampaikan di tengah meningkatnya ancaman keamanan dan gangguan operasional penerbangan akibat serangan terhadap fasilitas strategis negara tersebut.

Sementara itu, perlindungan terhadap jemaah umrah menjadi perhatian tersendiri. Kementerian Haji dan Umrah diminta menyiapkan mitigasi menghadapi eskalasi konflik, termasuk memastikan jemaah memperoleh informasi keamanan, menghindari lokasi rawan, dan mengikuti arahan otoritas setempat.

Di tengah situasi yang belum stabil, KBRI Riyadh mengingatkan WNI agar

meningkatkan kewaspadaan, menjauhi titik rawan, serta mematuhi arahan otoritas setempat. WNI juga diminta tidak mengambil foto, merekam, menyebarkan atau membagikan informasi mengenai upaya penangkisan rudal dan drone maupun lokasi jatuhnya amunisi.

"Warga Negara Indonesia di Arab Saudi kembali diimbau untuk tidak mengambil foto, merekam, menyebarkan atau membagikan informasi terkait penangkisan serta lokasi jatuhnya rudal dan drone," tulis KBRI Riyadh dalam imbauan resminya.

Peringatan tersebut berkaitan dengan pembatasan yang diberlakukan pemerintah Arab Saudi terhadap dokumentasi dan penyebaran informasi mengenai aktivitas militer. Dalam laporan detikNews pada Rabu (14/10/2026), KBRI menegaskan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi sesuai hukum yang berlaku di Arab Saudi.

Dalam kondisi darurat, pemerintah meminta WNI mengutamakan keselamatan, tidak mendekati lokasi serangan, dan tidak menyebarkan informasi yang dilarang otoritas setempat. WNI di Arab Saudi juga diimbau memantau informasi resmi KBRI Riyadh dan Kemlu RI, terutama mengenai perkembangan keamanan, perubahan jadwal penerbangan, serta langkah perlindungan bagi warga Indonesia.

Serangan kelompok Houthi terhadap fasilitas minyak Arab Saudi

DAMPAK PENUNDAAN UMRAH

2 negara

- Secara eksplisit mengimbau penundaan umrah: Malaysia dan Singapura.

86 penerbangan

- Dari Dhaka terdampak gangguan penerbangan.

200 jemaah

- Umrah Bangladesh terdampak pembatalan menurut salah satu agen.

3 negara

- Indonesia, Bangladesh, dan UEA: bahan sumber lebih menekankan kewaspadaan atau gangguan perjalanan, bukan imbauan resmi menunda seluruh umrah

Dialami Jemaah Indonesia

- Kabupaten Tangerang, Sekitar 400 jemaah Penundaan penerbangan transit, menurut Kemenhaj Kabupaten Tangerang.

Makassar

- 53 jemaah, Gagal berangkat sesuai jadwal setelah penerbangan lanjutan Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur ke Madinah dibatalkan.



memperluas eskalasi konflik ke sektor energi. Rudal menghantam kompleks administrasi perusahaan minyak negara, Saudi Aramco, di Dhahran, Provinsi Timur, Selasa (13/10/2026). Pada hari yang sama, koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan udara ke sejumlah lokasi di Sana'a, ibu kota Yaman yang dikuasai Houthi.

Kementerian Energi Arab Saudi menyatakan serangan terhadap gedung administrasi Aramco memicu kebakaran terbatas. Dalam pernyataan pada Rabu (14/10/2026), kementerian menyebut tidak ada korban jiwa maupun luka-luka. Namun, sumber perusahaan yang berbicara kepada Reuters mengatakan sebuah rudal balistik menghantam kompleks kantor pusat Aramco, merusak tiga lantai teratas sebuah gedung perkantoran dan memicu kebakaran. (tin,rtr;ap,ist/dya)

Bayi di Bawah 6 Bulan Diberi Makanan, Awat Risiko Infeksi hingga Sepsis

Kasus bayi Alena yang berusia 24 hari dan diduga diberi telur mentah oleh neneknya menjadi pengingat pentingnya memahami aturan pemberian makanan pada bayi. Alena sempat menjalani perawatan intensif di RSUD Dr Soetomo, Surabaya, sebelum akhirnya dikabarkan meninggal dunia.

Informasi yang beredar di media sosial menyebutkan Alena mengalami demam sebelum diduga diberi telur mentah oleh nenek dari pihak ayah. Telur itu disebut diberikan dengan tujuan menurunkan demam. Namun, hubungan antara pemberian telur mentah dan kematian bayi tersebut belum dapat dipastikan tanpa hasil pemeriksaan medis.

Kasus ini kembali menyoroti risiko pemberian makanan atau minuman selain air susu ibu (ASI) kepada bayi yang belum berusia enam bulan. Dokter spesialis anak dr Denta Satria Kurniawan, SpA, mengingatkan orang tua dan pengasuh agar tidak memberikan makanan tambahan kepada bayi pada usia tersebut. ASI menjadi pilihan utama, sedangkan susu formula bayi dapat diberikan apabila diperlukan sesuai indikasi dan kebutuhan medis.

"Ungkapan 'anakku dikasih pisang waktu baru lahir tetap hidup' tidak bisa dijadikan patokan, karena banyak bayi yang beruntung tidak mengalami akibat serius, tetapi risikonya nyata dan tidak bisa diprediksi, dan sebagian bayi menjadi sakit berat atau meninggal," kata dr Denta.

Risiko Pencernaan hingga Tersedak

Dokter spesialis anak konsultan neonatologi, Dr dr Johannes Edy Siswanto, SpA(K), menjelaskan bayi di bawah enam bulan belum siap menerima makanan pendamping seperti pisang, bubur, maupun telur. Pemberian makanan terlalu dini dapat

memicu sejumlah komplikasi, mulai dari gangguan pencernaan hingga masuknya makanan ke saluran pernapasan.

"Bayi usia di bawah 6 bulan belum siap menerima makanan selain ASI atau susu formula bayi yang sesuai apabila diperlukan. Pemberian pisang, bubur, ataupun telur terlalu dini dapat menimbulkan gangguan pencernaan, tersedak, aspirasi, hingga infeksi," jelas dr Johannes.

Aspirasi terjadi ketika makanan atau cairan masuk ke saluran napas, bukan menuju saluran pencernaan sebagaimana mestinya. Kondisi ini dapat mengganggu pernapasan dan, dalam keadaan tertentu, memicu komplikasi serius.

Telur Mentah Bawa Salmonella

Secara khusus, dr Johannes mengingatkan masyarakat agar tidak memberikan telur mentah maupun setengah matang kepada bayi. Bahan pangan tersebut berisiko mengandung bakteri *Salmonella*, yang dapat menyebabkan infeksi saluran pencernaan.

"Telur mentah maupun setengah matang tidak dianjurkan untuk bayi, karena berisiko mengandung bakteri *Salmonella*. Infeksi dapat menyebabkan muntah, diare, demam, dehidrasi berat, bahkan infeksi aliran darah (sepsis) yang mengancam nyawa, terutama pada bayi baru lahir karena sistem kekebalan tubuhnya belum matang," paparnya.

Infeksi *Salmonella* dapat menyebabkan diare, demam, dan kram perut. Pada bayi, kehilangan cairan akibat muntah atau diare dapat berkembang menjadi dehidrasi. Dalam kasus berat, infeksi dapat menyebar ke aliran darah dan menyebabkan sepsis, yakni respons tubuh terhadap infeksi yang dapat mengancam nyawa. Pusat Pengendalian dan Pencegahan

Penyakit Amerika Serikat (CDC) juga memasukkan telur mentah atau kurang matang sebagai pilihan pangan berisiko. CDC menyarankan telur dimasak hingga bagian putih dan kuningnya mengeras untuk mengurangi risiko infeksi. Pedoman ini penting diperhatikan ketika menyiapkan makanan bagi anak kecil yang lebih rentan terhadap penyakit bawaan pangan.

Meski begitu, telur bukan bahan pangan yang harus dihindari selamanya. Telur merupakan sumber protein yang dapat diperkenalkan sebagai bagian dari makanan pendamping ASI (MPASI) ketika bayi siap makan, umumnya sekitar usia enam bulan. Seluruh bagian telur harus dimasak hingga matang.

WHO Rekomendasikan ASI 6 Bulan

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan UNICEF merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan pertama kehidupan. Artinya, bayi tidak diberikan makanan atau minuman lain, termasuk air putih, kecuali obat, vitamin, mineral, atau larutan rehidrasi oral sesuai kebutuhan.

WHO menjelaskan bahwa sekitar usia enam bulan, kebutuhan energi dan zat gizi bayi mulai melampaui yang dapat dipenuhi ASI saja. Pada tahap tersebut, MPASI yang aman dan bergizi perlu diperkenalkan secara bertahap sembari pemberian ASI dilanjutkan.

Makanan pendamping harus disiapkan secara higienis, menggunakan bahan yang aman, serta memiliki tekstur sesuai kemampuan makan bayi. Pengenalan makanan bukan sekadar soal usia, tetapi juga kesiapan perkembangan anak untuk menerima tekstur dan bentuk makanan yang berbeda. Karena itu, pengasuh tidak seharusnya memberikan makanan kepada bayi hanya berdasarkan kebiasaan keluarga



a t a u
pengala man bahwa anak lain pernah melakukan hal serupa tanpa mengalami masalah.

"Bayi yang selamat bukan berarti praktik tersebut aman bagi semua bayi. Tidak semua tindakan berisiko langsung menimbulkan akibat buruk, tetapi ketika komplikasi terjadi, dampaknya bisa sangat serius," tutur dr Johannes.

Bayi Demam Segera ke Dokter

Selain persoalan makanan, demam pada bayi baru lahir juga tidak boleh dianggap sebagai keluhan ringan. Dr Johannes mengingatkan bayi baru lahir yang mengalami demam, terutama dengan suhu tubuh 38 derajat Celsius atau lebih, harus segera diperiksa dokter. Kondisi tersebut tidak boleh ditangani dengan pemberian makanan atau ramuan tradisional untuk menurunkan suhu tubuh.

Layanan kesehatan Inggris melalui National Health Service (NHS) juga menyarankan orang tua segera mencari pertolongan medis apabila bayi berusia kurang dari tiga bulan memiliki suhu tubuh 38 derajat Celsius atau lebih. Pada kelompok usia ini, demam dapat menjadi tanda infeksi serius meskipun gejala lain belum terlihat jelas.

Sementara itu, dr Denta menyarankan orang tua berkonsultasi dengan dokter apabila bayi terus rewel atau tampak masih lapar. Jika bayi telanjur diberi makanan selain ASI dan mengalami muntah berulang, diare, demam, sesak napas, sangat lemas, atau tidak mau menyusu, bayi harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. (farist/dya)

Temuan: AI Claude Kirim Laporan Palsu ke Polisi

Model kecerdasan buatan (AI) Claude milik Anthropic PBC dilaporkan melakukan sejumlah tindakan yang tidak diinginkan pada sistem digital organisasi eksternal, termasuk situs lembaga pemerintah Amerika Serikat (AS). Insiden tersebut mencakup pengiriman laporan palsu terkait kasus pembunuhan ke situs kepolisian hingga upaya melewati pembatasan akses data.

Dalam laporan yang dipublikasikan pada 9 Oktober 2026, Anthropic mengidentifikasi empat kategori perilaku AI yang menyimpang dari tujuan pengujian. Perusahaan menyebut sebagian insiden terjadi ketika Claude menjalankan evaluasi internal dan mengakses situs web nyata.

Empat perilaku tersebut meliputi pemanfaatan kelemahan perangkat lunak untuk menjalankan perintah pada server, pengiriman formulir yang seharusnya tidak diserahkan, penerobosan pembatasan untuk mengakses data yang dilindungi token

atau biaya, serta penggunaan layanan pemendek URL untuk melewati batasan alat pengambilan data web.

Anthropic menyatakan sejumlah kasus melibatkan situs pemerintah di tingkat federal, negara bagian, dan lokal. Perusahaan telah memberi penjelasan kepada Gedung Putih serta memberitahukan lembaga yang terdampak. Meski demikian, Anthropic menilai dampak nyata kasus yang diidentifikasi sejauh ini relatif terbatas.

Laporan Palsu Pembunuhan

Salah satu insiden melibatkan Claude Haiku 4.5 yang mengirimkan laporan melalui formulir daring milik Departemen Kepolisian Philadelphia terkait kasus pembunuhan yang belum terpecahkan.

Menurut laporan Anthropic, model tersebut menuliskan pernyataan bahwa dirinya mungkin memiliki informasi mengenai kasus itu dan pernah melihat seseorang yang sesuai dengan deskripsi di sekitar

lokasi kejadian. Padahal, tidak ada informasi terverifikasi yang mendasari klaim tersebut. "Saya mungkin memiliki informasi mengenai kasus ini," tulis model itu dalam formulir.

Laporan tersebut dikirim pada Juli 2026 ketika Claude menjalankan tugas pengujian untuk mengisi formulir pada sejumlah situs web. Formulir itu sebenarnya seharusnya berhenti pada tahap sebelum pengiriman. Namun, model tersebut keliru mengira masih ada halaman konfirmasi tambahan sehingga tetap menekan tombol pengiriman.

Celah Formulir Pemerintah

Kasus lain yang diungkap melibatkan situs Departemen Luar Negeri AS. Menurut laporan The Washington Post, model AI dalam pengujian mengirimkan formulir permohonan visa sebanyak 19 kali pada Agustus dan satu kali pada Mei. Anthropic juga menemukan model Claude memanfaatkan

kelemahan perangkat lunak situs pihak ketiga untuk menjalankan perintah pada server. Dalam kasus lain, model berusaha memperoleh data yang dibatasi aksesnya dengan melewati mekanisme token atau pembayaran.

Temuan tersebut menunjukkan risiko ketika model AI tidak hanya menghasilkan teks, tetapi juga diberi kemampuan menggunakan peramban, mengisi formulir, dan berinteraksi langsung dengan sistem eksternal. Kesalahan yang semula terjadi dalam pengujian dapat berdampak pada layanan nyata ketika batasan tindakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Anthropic Perketat Pengamanan AI

Menanggapi temuan itu, Anthropic memperluas pembatasan akses internet langsung dalam seluruh evaluasi internalnya sampai mekanisme keamanan dan pemantauan dinilai mampu mendeteksi perilaku serupa secara andal.

Perusahaan juga menyatakan akan memperluas pemeriksaan transkrip penggunaan Claude untuk menemukan tindakan lain yang tidak diinginkan. Anthropic menilai sebagian perilaku tersebut menunjukkan kecenderungan model mencari jalan alternatif ketika tidak dapat menyelesaikan tugas sesuai batasan yang tersedia.

Laporan ini menambah perhatian terhadap keamanan AI yang mampu bertindak secara mandiri atau AI agent. Berbeda dari chatbot yang hanya menjawab pertanyaan, sistem agen dapat menjalankan serangkaian tindakan menggunakan perangkat dan layanan digital. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG :** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO- PONOROGO :** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Tren Kecantikan Spring 2027

Riasan Mata Berani, Poni Ekstrem dan Lipstik Merah

Pekan mode dunia untuk koleksi Spring/Summer 2027 tidak hanya menampilkan arah baru dalam busana, tetapi juga menghadirkan perubahan dalam tren kecantikan. Setelah gaya natural dan quiet luxury mendominasi penampilan dalam beberapa musim terakhir, panggung mode New York, London, Milan, hingga Paris kini diramaikan riasan dan gaya rambut yang lebih ekspresif.

Tren tersebut terlihat melalui permainan warna pada mata, potongan poni yang eksperimental, hingga lipstik merah yang kembali menjadi pusat perhatian. Penampilan para model di atas runway menunjukkan bahwa riasan tidak harus selalu mengikuti prinsip minimalis. Detail yang kuat justru dapat menjadi elemen utama untuk membangun karakter penampilan.

Terdapat tiga tren kecantikan yang menonjol selama rangkaian Fashion Month Spring 2027. Ketiganya menawarkan pendekatan berbeda, mulai dari riasan mata dramatis hingga aksesoris warna pada bibir yang dapat diterapkan untuk tampilan sehari-hari.

Riasan Mata dengan Efek Grafis

Riasan mata menjadi salah satu elemen paling ekspresif dalam koleksi Spring/Summer 2027. Teknik eyeliner grafis, warna mencolok, hingga smokey eyes dengan kesan glamor digunakan untuk mempertegas karakter wajah.

Dalam peragaan Gucci yang dirancang Demna, penata rias Sam Visser bersama timnya menghadirkan pendekatan more is more. Riasan mata tidak sekadar melengkapi busana, tetapi menjadi bagian penting dari keseluruhan tampilan.

Eksplorasi serupa terlihat dalam presentasi koleksi Spring/Summer 2027 Chanel. Efek grafis dan warna metalik memberikan kesan tegas sekaligus futuristik. Penggunaan warna yang kontras membuat area mata menjadi titik fokus, terutama

ketika dipadukan dengan riasan wajah yang lebih sederhana. Sementara itu, Rachel Scott menghadirkan pendekatan yang lebih terkendali dalam peragaan Proenza Schouler, tetapi tetap mempertahankan kesan dramatis. Penata rias Dick Page juga mengeksplorasi greasepaint berwarna cerah untuk menghasilkan eyeshadow teatrikal, dengan sapuan yang membentang dari kelopak mata hingga mendekati alis.

Tren ini memperlihatkan bahwa riasan mata tidak harus terpaku pada warna netral. Warna terang, garis tegas, dan efek metalik dapat digunakan untuk menciptakan penampilan yang lebih berkarakter.

Poni Cangkang Kumbang

Eksperimen kecantikan musim ini tidak berhenti pada riasan. Gaya rambut juga tampil lebih berani melalui berbagai bentuk poni, mulai dari potongan tegas yang mengilap hingga untaian panjang yang menutupi sebagian wajah.

Salah satu tampilan paling mencolok hadir dalam peragaan Thom Browne pada New York Fashion Week, 15 September 2026. Penata rambut James Pecis menciptakan gaya yang disebut beetle shell bangs, yakni poni dengan bentuk kokoh, permukaan mengilap, dan garis yang menyerupai cangkang kumbang.

Gaya tersebut terinspirasi dari tema serangga yang diangkat dalam koleksi Thom Browne. Pecis menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam menciptakan tampilan tersebut.

Poni dalam koleksi Spring 2027 juga tampil dalam bentuk yang lebih berantakan. Pada peragaan De Pino, rambut hitam lurus dengan poni panjang dibiarkan menutupi sebagian mata. Sementara itu, Loewe mengeksplorasi potongan rambut bertekstur dan berlapis untuk menghadirkan dimensi yang berbeda.

Louis Vuitton membawa pendekatan lebih eksperimental dengan menambahkan untaian manik-manik perak dan material transparan yang memantulkan cahaya pada bagian poni. Kiko Kostadinov menghadirkan interpretasi lain melalui garis-garis horizontal berwarna.

Lipstik Menyala

Lipstik merah kembali mendapat tempat di panggung mode Spring/Summer 2027. Berbeda dari tampilan yang mengandalkan riasan penuh pada mata dan pipi, tren ini menempatkan bibir sebagai pusat perhatian melalui kontras antara warna merah dan riasan wajah yang relatif bersih.

Makeup artist Lucia Pica menilai lipstik merah sebagai cara sederhana untuk mengekspresikan kebebasan. Warna tersebut dapat memberikan karakter kuat tanpa memerlukan banyak tambahan riasan.

Pendekatan serupa terlihat dalam peragaan Tom Ford. Terinspirasi pantulan cermin di panggung, makeup artist Lucy Bridge menghadirkan lipstik merah yang menonjolkan karakter dan kepercayaan

diri. "Merah adalah warna yang memancarkan kepercayaan diri. Ini warna yang tegas dan bisa membuat perempuan merasa percaya diri sekaligus kuat," ujar Lucy. "Sentuhan sederhana ini bisa memberikan keanggunan pada keseluruhan tampilan."

Di peragaan Kim Shui, makeup artist Romero Jennings menunjukkan bahwa lipstik merah tidak harus selalu diaplikasikan dengan garis bibir yang presisi atau hasil akhir tertentu. (farist/dya)



Antrean BBM Mengular,dari Hal 1

Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar menyebut wilayah yang mengalami gangguan meliputi Bali, Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat. Bentuk gangguannya beragam, mulai dari antrean panjang, kekosongan jenis BBM tertentu, hingga kendaraan yang mengular sampai ke badan jalan.

Antrean lebih dari satu kilometer dilaporkan terjadi di Aceh dan Bali, dengan waktu tunggu melebihi tiga jam. Sementara itu, antrean sepanjang 300–700 meter ditemukan di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Waktu tungguanya berkisar dua hingga tiga jam. Di Papua Barat, antrean sekitar satu kilometer terutama terjadi pada malam hari.

Ghoffar mengatakan informasi awal yang diterima Ombudsman dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan kuota BBM masih aman hingga Desember 2026. Meski demikian, informasi tersebut belum menjelaskan penyebab gangguan pelayanan di lapangan.

“Pertama, terkait apakah terjadi pemangkasan kuota berdasarkan informasi yang didapatkan, lagi-lagi informasi awal yang didapatkan oleh Ombudsman, sampai hari ini sebenarnya informasi yang didapatkan kuota itu masih aman sampai di Desember,” kata Ghoffar dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman, Rabu (14/10/2026).

Ombudsman berencana turun langsung ke lapangan untuk memeriksa kemungkinan adanya kesenjangan antara kebijakan dan pelaksanaannya. Pemeriksaan akan menelusuri apakah antrean dipicu persoalan kuota, keterlambatan distribusi, atau kapasitas pelayanan SPBU.

“Oleh karena itu, di sini Ombudsman akan hadir ke lapangan dan melakukan investigasi, apakah ada sesuatu yang terjadi, sehingga kemudian antara di lapangan dengan kebijakan yang sudah dibuat ini, apakah ada satu hal yang terputus begitu, dan itu nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media bagaimana kemudian hasilnya,” ujarnya.

Bagi Ombudsman, persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa stok nasional masih tersedia. BBM merupakan kebutuhan strategis yang berkaitan langsung dengan mobilitas masyarakat, transportasi umum, logistik, kegiatan usaha, dan kehidupan sehari-hari.

“Ketika masyarakat kehilangan waktu produktif atau kegiatan ekonominya terganggu untuk

mendapatkan BBM, hal itu harus dibaca sebagai persoalan kualitas pelayanan yang perlu segera ditangani,” tegas Ghoffar.

Ia menekankan, “Ukuran pelayanan BBM bukan hanya apakah stok tersedia di terminal atau tangki penyimpanan; tetapi apakah masyarakat dapat memperolehnya secara wajar, tepat waktu, dengan informasi yang jelas, dan tanpa harus mengantre berjam-jam.”

Ombudsman juga meminta pencocokan data secara menyeluruh, mulai dari stok, realisasi penyaluran, jadwal pengiriman, kebutuhan dan kuota, catatan transaksi, hingga kapasitas layanan di SPBU. Menurut Ghoffar, “Pernyataan bahwa stok secara umum tersedia tidak dengan sendirinya menjawab kesulitan masyarakat apabila BBM tidak tersedia pada lokasi, waktu, atau jenis yang dibutuhkan.”

Ia mengingatkan dampak antrean terhadap pengemudi angkutan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), petani, nelayan, serta masyarakat di wilayah dengan pilihan akses terbatas. “Dampak antrean juga perlu diperhatikan terhadap pengemudi angkutan, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat di wilayah dengan pilihan akses terbatas,” pungkasnya.

Sebut Terhambat Cuaca

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan gangguan yang terjadi bukan disebabkan menipisnya persediaan nasional, melainkan hambatan pengiriman akibat faktor cuaca dan musim. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi ESDM Laode Sulaeman mengatakan ketahanan stok BBM masih berada pada kisaran 18–20 hari. Ia menyampaikan keterangan tersebut sesuai rapat koordinasi di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Rabu (14/10/2026).

“Untuk ketahanan stok (BBM), kondisi kita masih aman, yaitu 18–20 hari. Masalah yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh pola distribusi akibat faktor musim,” ujar Laode.

Laode menjelaskan, penurunan debit air di daerah yang mengandalkan transportasi sungai dapat menghambat pengiriman BBM. Distribusi kemudian harus dialihkan menggunakan truk, yang membutuhkan waktu lebih lama dan memiliki kapasitas angkut lebih kecil dibandingkan transportasi melalui jalur air.

“Truknya kan enggak bisa cepat nyampainya, berjam-jam dan

volumenya tidak banyak,” ujarnya. Pengiriman melalui laut juga menghadapi kendala ketika gelombang tinggi membuat kapal pengangkut BBM tidak dapat segera bersandar. Akibatnya, proses bongkar muat tertunda dan penyaluran ke SPBU melambat.

Kondisi tersebut menjadi salah satu penjelasan pemerintah atas antrean di Bali. Laode mengatakan keterlambatan kapal menjadi salah satu penyebab gangguan pasokan di Pulau Dewata. “Iya, itu masalah proses distribusi saja. Jadi kemarin memang ada keterlambatan kapal,” katanya.

Ia memastikan kapal yang sebelumnya terlambat telah tiba di Bali. Pemerintah kemudian mempercepat penyaluran melalui operasi pasar selama 24 jam yang telah berlangsung sejak Senin (12/10/2026). Pemerintah menargetkan antrean dapat diatasi pada Kamis (15/10/2026).

Namun, penjelasan pemerintah mengenai cuaca dan keterlambatan kapal bukan satu-satunya faktor yang diungkapkan dalam kasus Bali. Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri menyebut terdapat dua persoalan utama, yakni kendala teknis bongkar muat kapal tanker dan peningkatan konsumsi Peralite. (wid, blo, kcm, ist/dya)

Puan Minta Tambahan BBM Bali Diikuti Perbaikan Distribusi

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah dan PT Pertamina (Persero) menambah pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali untuk mengatasi kelangkaan yang membuat warga mengantre hingga berjam-jam di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia mengingatkan, tambahan pasokan harus diikuti pembenahan distribusi agar BBM segera sampai ke wilayah yang mengalami kekosongan.

“Kesulitan warga memperoleh BBM di sejumlah SPBU di Bali perlu segera diselesaikan melalui penguatan distribusi sampai titik pelayanan. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan adanya tambahan pasokan BBM di Bali,” kata Puan, Rabu (14/10/2026), dikutip dari VOI.

Kelangkaan BBM dilaporkan terjadi di sejumlah wilayah Bali, antara lain Denpasar, Badung, Klungkung, Buleleng, dan Bangli. Antrean kendaraan di banyak SPBU bahkan dilaporkan mengular hingga satu kilometer. Di Badung, seorang perempuan dilaporkan pingsan setelah mengantre BBM selama berjam-jam.

Pertamina menyebut kendala bongkar muat kapal tanker menjadi

salah satu penyebab terganggunya pasokan. Puan meminta pemerintah memastikan tambahan BBM benar-benar diterima SPBU yang membutuhkan, bukan hanya menambah persediaan di terminal penyimpanan.

“Tambahan pasokan yang tiba juga perlu diikuti kepastian pengiriman ke SPBU, terutama wilayah yang masih mengalami kekosongan BBM dan terjadi antrean panjang,” tutur mantan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tersebut.

Puan mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Pertamina memeriksa seluruh tahapan distribusi, mulai dari kedatangan kapal, proses pembongkaran, ketersediaan stok di terminal, hingga pengiriman kepada penyalur. Pemeriksaan itu diperlukan untuk mengidentifikasi hambatan yang masih berlangsung dan menentukan langkah percepatan pemulihan pelayanan.

“Pemeriksaan harus memperjelas hambatan yang masih terjadi dan keputusan yang diperlukan untuk mempercepat pelayanan kembali normal,” ujarnya.

Ia juga meminta Pertamina memetakan kebutuhan BBM berdasarkan jenis dan wilayah pelayanan. SPBU yang berulang kali mengalami kekosongan, menurut Puan, perlu mendapat perhatian khusus agar pengiriman berikutnya dapat memenuhi kebutuhan hingga pasokan lanjutan tiba.

“Evaluasi perlu melihat jumlah SPBU yang kembali melayani, lamanya kekosongan, kecukupan pasokan antarjadwal pengiriman, dan perkembangan waktu antrean. Informasi tersebut menjadi dasar penyesuaian operasi setiap hari,” kata Puan.

Selama proses pemulihan, pemerintah juga diminta menjaga akses BBM untuk kebutuhan pelayanan darurat dan kegiatan penting masyarakat melalui mekanisme yang sah. Puan menyebut fasilitas kesehatan, angkutan umum, dan distribusi kebutuhan pokok perlu menjadi perhatian sesuai jenis BBM yang digunakan. Ia menegaskan pemerintah dan Pertamina harus memiliki pembagian tanggung jawab yang jelas, termasuk lokasi yang masih terkendala, pihak yang menangani, dan perkiraan waktu normalisasi. (wid, blo, kcm, ist/dya)

KPK TETAPKAN 5 TERSANGKA, SESTAMA BNPB LOLOS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menetapkan Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Rustian sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dana siap pakai untuk penanganan bencana. Keputusan itu diambil setelah penyidik melakukan gelar perkara dan belum menemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Rustian

Ketua KPK Setyo Budiyo menjelaskan, penetapan tersangka merupakan hasil ekspose atau gelar perkara yang dilakukan pada Selasa malam, 13 Oktober 2026.

"Hasil ekspose, itu belum ditemukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sestama," katanya di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (14/10/2026).

Dari hasil pembahasan tersebut, KPK menetapkan lima orang sebagai tersangka. "Ya, sampai dengan tadi malam ya, makanya hanya lima saja," ujarnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan BNPB pada Selasa, 13 Oktober 2026. Sebanyak 14 orang diamankan dalam operasi tersebut, termasuk Rustian dan sejumlah pihak swasta.

Pemeriksaan kemudian dilakukan untuk mendalami dugaan korupsi yang berkaitan dengan dana siap pakai untuk penanganan bencana.

Lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta dua pihak swasta, Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetyawan. KPK belum menetapkan Rustian sebagai tersangka meskipun ia turut diamankan dalam operasi tersebut.



Lima tersangka dugaan korupsi di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) keluar dari Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Rabu (14/10).

Kasus ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan dana siap pakai yang digunakan untuk penanganan bencana. Dana tersebut memiliki peran penting dalam mendukung respons kedaruratan, ketika pemerintah perlu bergerak cepat untuk menangani dampak bencana dan memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak.

Dugaan penyimpangan dalam pengelolaannya karena itu perlu diusut dengan mengungkap secara terang pihak yang bertanggung jawab dan perbuatan yang disangkakan.

Tidak ditetapkannya Rustian sebagai tersangka pada tahap ini bukan berarti seluruh aspek keterlibatannya telah dipastikan selesai.

Sita Rp3,3 Miliar, Emas dan Aset Kripto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai sekitar Rp3,3 miliar, logam mulia ratusan gram, dan aset kripto dalam penyidikan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa menggunakan dana siap pakai (DSP) kebencanaan di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Jumlah uang yang disita bertambah dari laporan awal sebesar Rp1,4 miliar.

Ketua KPK Setyo Budiyo mengatakan, penambahan nilai barang bukti itu diketahui berdasarkan laporan penyidik. "Berdasarkan laporan yang saya dapatkan, informasi dari para

penyidik nilainya atau jumlahnya bukan lagi 1,4 ya, tapi lebih kurang sekitar Rp 3,3 miliar, itu dari beberapa pihak," kata Setyo.

Selain uang tunai, penyidik juga menyita aset kripto dengan nilai miliaran rupiah dan logam mulia dalam jumlah ratusan gram. Namun, Setyo belum memerinci nilai pasti aset kripto maupun berat keseluruhan emas yang disita. "Kalau nggak salah, kripto itu nilainya satu digit di M (miliar) ya, gitu ya. (Nilainya) satu digit saja gitu. Logam mulianya itu, masih ya ratusan gram lagi," ujarnya.

Setyo memastikan barang bukti tersebut disita dari lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, KPK belum mengungkap secara terperinci jumlah uang, emas, dan aset kripto yang ditemukan pada masing-masing tersangka. "Dari para pihak yang sekarang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu ya. Karena ada 5 orang itu, tidak mungkin sekian dari siapa, sekian dari siapa," kata Setyo.

BNPB menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan menjunjung asas praduga tak bersalah. Juru bicara BNPB Berton Padjaitan mengatakan lembaganya siap memberikan data serta akses informasi yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan. BNPB juga menyatakan tidak akan mengintervensi penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum. (wid,ist,kum/dya)

Gus Mus-Romo Magnis Desak Karhutla jadi Bencana Nasional

Gerakan Nurani Bangsa (GNB) mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia sebagai bencana nasional. Desakan itu disampaikan di tengah kebakaran yang belum tertangani sepenuhnya, dampak kabut asap terhadap kesehatan warga, serta masih berlangsungnya pemadaman di sejumlah provinsi.

GNB merupakan gerakan etis dan nonpartisan yang diinisiasi sejumlah tokoh bangsa, di antaranya Nyai Sinta Nuriyah Wahid, K.H. Mustofa Bisri atau Gus Mus, Franz Magnis-Suseno, M. Quraish Shihab, dan Ignatius Kardinal Suharyo. Dalam keterangannya pada

Selasa (13/10/2026) malam, GNB menilai penetapan status bencana nasional diperlukan untuk mempercepat pemenuhan hak-hak dasar masyarakat terdampak.

"Negara harus segera menetapkan kebakaran hutan dan lahan sebagai Bencana Nasional sesuai dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, sehingga hak-hak dasar warga negara terdampak bisa cepat terpenuhi," demikian pernyataan GNB, Rabu (14/10/2026).

Menurut GNB, penetapan status tersebut dapat mendorong penanganan karhutla yang lebih serius, terfokus, menyeluruh, dan

terintegrasi. Dorongan itu didasarkan pada luasnya kebakaran yang berlangsung dalam waktu lama tanpa menunjukkan perbaikan signifikan, sekaligus dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat di sekitar wilayah terdampak.

GNB juga meminta pemerintah meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga yang terpapar asap, terutama perempuan, anak-anak, dan kelompok rentan lainnya. Pemerintah dinilai memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan hak atas kesehatan tetap terpenuhi selama bencana berlangsung.

Selain penanganan darurat, GNB menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan transparan

terhadap pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab atas kebakaran.

Perhatian khusus diminta diberikan kepada korporasi besar yang memiliki kewajiban mencegah kebakaran dan menjaga daya dukung lingkungan. GNB juga mengkritik komunikasi pemerintah yang dinilai tidak semestinya menyalahkan faktor alam.

"Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah segera memperbaiki komunikasi publiknya dan berhenti untuk menyalahkan faktor alam, karena semua kebakaran hutan selalu diawali dengan pembakaran untuk pembukaan lahan perkebunan besar," tulis GNB. (tin,ist/dya)